

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN PPN 12%

Rifansyah Bayu Pratama, Imahda Khoiri Furqon

Ekonomi Syariah, FEBI, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
rifansyah.bayu.pratama@mhs.uingusdur.ac.id, imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to study the perceptions of students at K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan towards the policy of increasing Value Added Tax (VAT) to 12%. Data were collected through a structured questionnaire survey. The results showed that the majority of students are aware of this policy and use social media mostly to get information about it. However, their understanding of the objectives and impacts of the policy still varied, reflecting the role of educational institutions that are not yet optimal in providing economic literacy. The impact of the VAT increase was felt mainly on daily expenses, thus affecting students' consumption patterns. Perceptions of fairness towards this policy also varied, depending on the socio-economic background of students. This study recommends that the government improve more inclusive communication strategies, as well as provide support to students, such as scholarship programs, to reduce the impact of the policy. These findings provide important insights into the response of the younger generation to fiscal policy in Indonesia.

Keywords: VAT, Student Perception, VAT Increase

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari persepsi mahasiswa di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa menyadari adanya kebijakan ini dan menggunakan media sosial sebagian besar untuk mendapatkan informasi. Namun, pemahaman mereka terhadap tujuan dan dampak kebijakan masih beragam, yang mencerminkan peran institusi pendidikan yang belum optimal dalam memberikan literasi ekonomi. Dampak kenaikan PPN dirasakan terutama pada pengeluaran sehari-hari, sehingga memengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Persepsi keadilan terhadap kebijakan ini juga bervariasi, tergantung pada latar belakang sosial-ekonomi mahasiswa. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan strategi komunikasi yang lebih inklusif, serta memberikan dukungan kepada mahasiswa, seperti program beasiswa, untuk mengurangi dampak kebijakan. Temuan ini memberikan wawasan penting terkait respons generasi muda terhadap kebijakan fiskal di Indonesia.

Kata kunci: PPN, Persepsi Mahasiswa, Kenaikan PPN

PENDAHULUAN

Selain sektor migas dan nonmigas, pajak memainkan peran strategis dalam mendorong perekonomian negara dan diatur secara terencana sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pendapatan pajak dikelola oleh sistem pengelolaan keuangan negara. oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pada awalnya, pajak belum menjadi kewajiban formal, melainkan hanya berupa kontribusi sukarela dari rakyat kepada pemimpin untuk memenuhi kebutuhan negara. Bagi masyarakat yang tidak memberikan kontribusi dalam bentuk pajak, diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan demi kepentingan umum selama beberapa hari dalam setahun. (Lintang et al., 2022)

Pengelolaan pajak sangat penting untuk stabilitas keuangan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Bahkan, pajak bertanggung jawab atas sebagian besar pendapatan nasional. Sebagai contoh, pendapatan pajak menyumbang 1,5 triliun rupiah pada tahun 2022 dari pendapatan negara total 2,2 triliun rupiah.(Nariswari et al., 2024)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara di banyak negara, menyumbang sekitar seperempat dari total pendapatan pajak global. Di Indonesia, penerimaan PPN menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak tahun 1989 hingga 2004. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari reformasi sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 1984.(Trisnayanti, Ida Ayu Ivon; Jati, 2017)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang paling banyak diperdebatkan di Indonesia saat ini. Menurut Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN akan naik dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan kemudian naik paling lambat menjadi 12% pada 1 Januari 2025.(Liyana, 2021)

Sebagai hasil dari penetapan kenaikan tarif PPN, reaksi masyarakat di media sosial dan platform berita menunjukkan pandangan yang beragam, baik mendukung maupun menentang kebijakan tersebut, termasuk munculnya tagar seperti #BoikotBelanja. Fenomena ini memotivasi dilakukannya penelitian, mengingat berbagai kalangan dan profesi netizen turut memberikan pandangan terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Selain itu, respons netizen di media sosial mencerminkan kesadaran pribadi mereka terhadap dampak yang dirasakan akibat kenaikan tersebut, sehingga dapat dianggap sebagai representasi dari masyarakat Indonesia. (Ghita Intan, 2024)

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, memiliki populasi mahasiswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Dengan kondisi tersebut, penting untuk memahami bagaimana kebijakan kenaikan PPN ini dipersepsikan oleh mahasiswa universitas ini. Apakah mereka memahami alasan di balik kebijakan ini? Apakah mereka merasakan dampaknya secara langsung terhadap pengeluaran sehari-hari mereka?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji persepsi mahasiswa di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12%. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai pola pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan publik, serta dampaknya terhadap pola konsumsi mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam meningkatkan literasi ekonomi masyarakat muda, sehingga dapat mendukung implementasi kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan efektif.

KAJIAN TEORI

Pajak

Pajak, menurut Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh seseorang atau badan hukum kepada negara. Tidak ada imbalan langsung yang diberikan

kepada pembayar pajak karena pajak ini dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.(Larasati & Wibowo, 2022)

Pajak pertambahan nilai (PPN)

Menurut (Putri & Subandoro, 2022) pajak pertambahan nilai (PPN) didefinisikan sebagai pajak yang diterapkan pada aktivitas konsumsi di wilayah domestik (Daerah Pabean), mencakup konsumsi barang maupun jasa. Berdasarkan berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan langsung berupa layanan tertentu dari negara kepada pembayar pajak.

Persepsi

Menurut (Gressner & Gressner, 2018) Persepsi pada dasarnya adalah proses mental yang dialami setiap orang saat mencerna informasi dari lingkungannya melalui penciuman, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan pengalaman. Ini memungkinkan orang untuk menafsirkan dan memahami lingkungannya. Pemahaman terhadap persepsi berfokus pada kenyataan bahwa persepsi merupakan interpretasi unik terhadap suatu situasi, bukanlah sebuah pencatatan fakta yang sepenuhnya objektif tentang keadaan tersebut.

Pola Konsumsi Mahasiswa

Mahasiswa memiliki aktivitas konsumsi, seperti rumah tangga. Total belanja yang dilakukan oleh siswa untuk berbagai kebutuhan termasuk dalam pengeluaran konsumsi siswa. Kebutuhan mahasiswa biasanya dibagi menjadi dua kategori utama: makanan dan non-makanan. Oleh karena itu, mahasiswa akan membagi pendapatannya untuk memenuhi kedua kategori ini berdasarkan tingkat pendapatan mereka.(Debora Wurangian et al., 2015)

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data, artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan survei. Persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% adalah subjek penelitian ini.

Penelitian ini melibatkan seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan teknik pengambilan sampel purposive digunakan. Untuk mendapatkan pemahaman yang representatif tentang dampak kebijakan, mahasiswa program studi ekonomi syariah dipilih.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa mengenai kebijakan PPN, dampak kenaikan pajak terhadap pengeluaran pribadi mereka, serta persepsi mereka terhadap keadilan dan efektivitas kebijakan ini. Kuesioner dibagikan secara daring untuk menjangkau responden secara lebih luas dan efisien.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, menurut (Ummah, 2019) Penelitian Deskriptif secara sistematis menganalisis data. Analisis persentase dan kecenderungan digunakan. Kesimpulan yang dibuat tidak umum. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian survei yang bertujuan untuk menggambarkan cara mahasiswa melihat kebijakan kenaikan PPN. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, diagram, dan narasi deskriptif untuk memberikan gambaran lengkap tentang cara mahasiswa melihat masalah ini. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi persepsi, seperti latar belakang sosial ekonomi dan sumber informasi yang mereka gunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melihat kebijakan

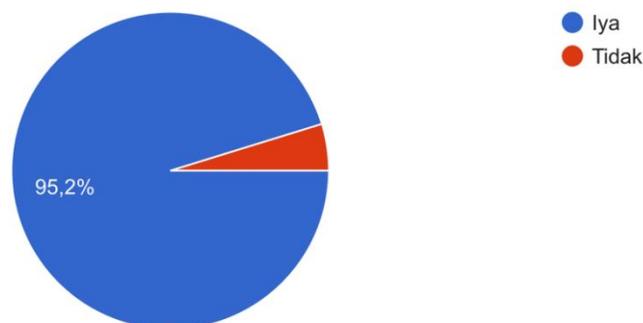
kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa berbagai tanggapan menunjukkan perspektif dan pemahaman.

Pengetahuan Mahasiswa terhadap Kebijakan Kenaikan PPN

Mayoritas responden 95,2% menyadari adanya kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Sebagian besar mahasiswa mendapatkan informasi ini melalui media sosial dan berita online, yang menegaskan pentingnya peran media digital dalam menyebarkan informasi, khususnya di kalangan generasi muda yang cenderung aktif dalam menggunakan teknologi. Namun demikian, sebagian kecil mahasiswa melaporkan bahwa mereka mengetahui kebijakan ini melalui diskusi di lingkungan kampus. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun institusi pendidikan memiliki potensi untuk menjadi saluran informasi publik yang efektif, perannya dalam menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah masih belum optimal. Hal ini menimbulkan peluang bagi kampus untuk meningkatkan keterlibatan dalam edukasi kebijakan publik, baik melalui seminar, diskusi kelompok, atau media kampus. Dengan memaksimalkan peran institusi pendidikan, mahasiswa dapat menjadi lebih sadar dan kritis terhadap kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.

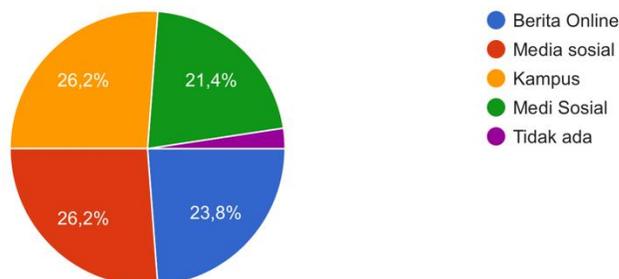
Apakah Anda mengetahui tentang kebijakan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%?

42 jawaban



Gambar 1. Pengetahuan Tentang Kenaikan PPN

Dari mana Anda mengetahui kebijakan ini?
42 jawaban



Gambar 2. Pengetahuan Tentang Kenaikan PPN

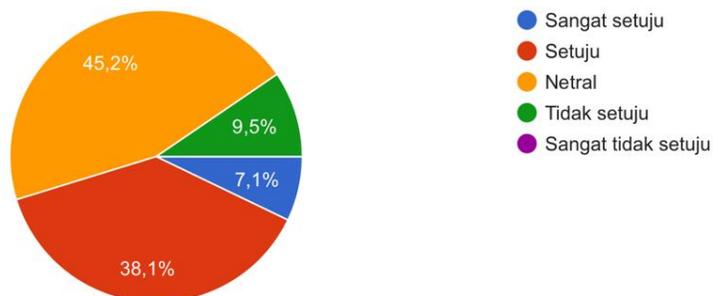
Pandangan Mahasiswa tentang Kenaikan PPN sebagai Instrumen Peningkatan Pendapatan Negara

Pandangan mahasiswa terhadap kenaikan PPN 12% menunjukkan keragaman pendapat. Sebagian besar responden bersikap netral terhadap pernyataan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara, sementara hanya sebagian kecil yang menyatakan setuju atau sangat setuju. Sikap netral ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Banyak mahasiswa belum memahami bagaimana pendapatan dari PPN digunakan dalam pembiayaan anggaran negara, seperti pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan publik. Selain itu, beberapa responden merasa bahwa kenaikan ini justru akan lebih berdampak pada masyarakat secara umum, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah.

Apakah Anda setuju bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara?

42 jawaban



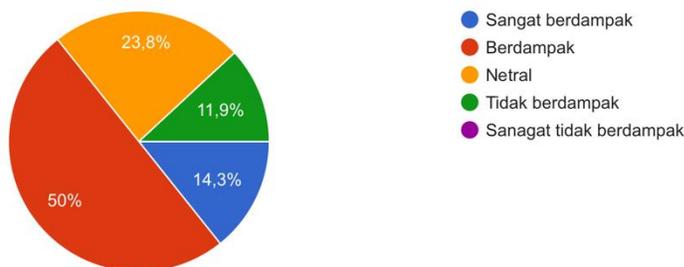
. Gambar 3. Pendapat Kenaikan PPN

Dampak Kenaikan PPN terhadap Pengeluaran Pribadi

Sebagian mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan merasa bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% akan berdampak langsung pada pengeluaran pribadi mereka. Dampaknya terutama dirasakan pada kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan barang-barang pokok. Peningkatan harga akibat kenaikan PPN menyebabkan sebagian mahasiswa harus menyesuaikan pola konsumsi mereka, misalnya dengan memilih alternatif produk yang lebih murah atau mengurangi pengeluaran pada kebutuhan sekunder. Tapi tidak semua mahasiswa merasakan dampak yang sama. Beberapa responden menganggap kenaikan ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Perbedaan persepsi ini dapat disebabkan oleh tingkat ketergantungan mahasiswa terhadap pengeluaran pribadi, sumber pendapatan tambahan, serta dukungan finansial dari keluarga.

Apakah kenaikan PPN berdampak langsung pada pengeluaran pribadi Anda?

42 jawaban



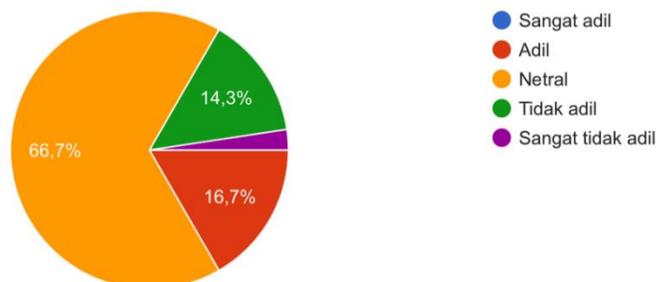
. Gambar 4. Dampak Kenaikan PPN

Persepsi Keadilan Kebijakan

Ketika diminta menilai kebijakan kenaikan PPN sebesar 12% dari segi keadilan, sebagian besar mahasiswa memberikan tanggapan netral. Namun, terdapat juga mahasiswa yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut adil, sementara lainnya merasa sebaliknya, yaitu tidak adil. Variasi pandangan ini mencerminkan keragaman sudut pandang yang ada di kalangan mahasiswa. Faktor-faktor seperti latar belakang sosial, tingkat pendapatan keluarga, dan pemahaman mereka tentang ekonomi kemungkinan besar memengaruhi persepsi ini. Mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang stabil cenderung lebih menerima kenaikan ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Sebaliknya, mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas mungkin merasa keberatan karena dampaknya yang langsung terhadap daya beli mereka. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi berbagai kelompok masyarakat, khususnya mahasiswa.

Bagaimana Anda menilai kebijakan kenaikan PPN dari segi keadilan bagi masyarakat?

42 jawaban



. Gambar 5. Kebijakan Kenaikan PPN Bagi Masyarakat

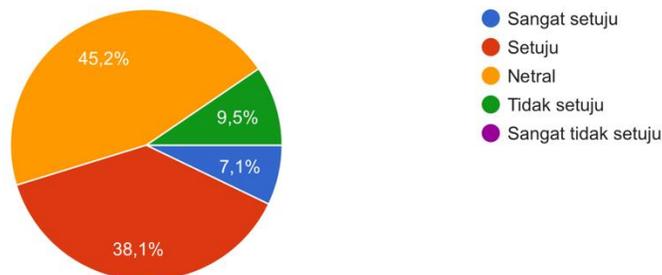
Komunikasi Pemerintah terkait Kebijakan

Sebagian besar mahasiswa merasa bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dikomunikasikan dengan cukup baik oleh pemerintah. Mereka memahami tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, sebagian responden menyatakan bahwa upaya komunikasi tersebut masih kurang memadai, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat muda. Responden ini menganggap informasi terkait kebijakan tersebut seringkali disampaikan dengan bahasa yang kurang sederhana atau melalui media yang kurang relevan dengan kebiasaan konsumsi informasi mereka.

Temuan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang lebih inklusif dan efektif. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih interaktif, seperti penggunaan platform media sosial atau kolaborasi dengan influencer yang dapat menyampaikan pesan secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Dengan demikian, harapannya kebijakan seperti kenaikan PPN dapat lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat luas.

Apakah Anda setuju bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara?

42 jawaban



Gambar 7. Informasi Kenaikan PPN Oleh Pemerintah

Saran Mahasiswa untuk Mengurangi Dampak Negatif

Mahasiswa memberikan berbagai saran kepada pemerintah untuk mengurangi dampak negatif kebijakan ini, terutama bagi kalangan mereka. Beberapa saran meliputi: Seperti saran dari salah satu responden kevin gusti ananda (20 tahun) pemerintah bisa melakukan penyuluhan berupa pendidikan, sosialisasi ataupun penyediaan program beasiswa, karena jika ada salah seorang mahasiswa yang terbebani karena terdampak oleh adanya ppn yang meningkat menurut saya dengan adanya penyediaan program beasiswa, mahasiswa yang terdampak dapat tetap melanjutkan pendidikan tanpa adanya beban atau biaya tambahan

Masukan Lain terkait Kebijakan

Ketika diminta memberikan masukan tambahan, beberapa mahasiswa menyatakan harapan bahwa kebijakan kenaikan PPN dapat dilaksanakan secara bijaksana dan tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Ada pula yang mengkritik kebijakan ini sebagai langkah yang kurang tepat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan memiliki kesadaran terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, namun pemahaman mendalam tentang mekanisme dan tujuan kebijakan tersebut masih kurang. Sebagian besar mahasiswa mengetahui kebijakan ini melalui media sosial, sementara peran institusi pendidikan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan publik dirasakan belum optimal. Dampak kenaikan PPN terhadap pengeluaran mahasiswa beragam, di mana sebagian mahasiswa harus menyesuaikan pola konsumsi mereka akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara sebagian lainnya tidak merasakan dampak yang signifikan. Persepsi terhadap keadilan kebijakan juga beragam, dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi mahasiswa. Sebagian mahasiswa menganggap kebijakan ini adil sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara, namun lainnya merasa kebijakan ini memberatkan, terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan literasi kebijakan publik di kalangan mahasiswa melalui pendekatan yang lebih inklusif dan interaktif. Pemerintah dapat memanfaatkan platform media sosial dan menggandeng institusi pendidikan untuk menyelenggarakan seminar, diskusi kelompok, atau penyuluhan tentang kebijakan fiskal. Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mengurangi dampak negatif kenaikan PPN, seperti pemberian bantuan atau subsidi khusus bagi kelompok rentan, termasuk mahasiswa. Institusi pendidikan juga dapat memainkan peran lebih aktif dalam memfasilitasi diskusi dan edukasi mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap kehidupan sehari-hari mahasiswa, guna menciptakan generasi muda yang lebih kritis dan responsif terhadap isu-isu kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Debora Wurangian, F., Engka, D., & Jacline, S. (2015). Analisis Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sam Ratulangi Yang Kost Di Kota Manado. *Jurnal Berskala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 75–77.
- Ghita Intan. (2024, November). Pengamat: Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen, Masyarakat Kelas Menengah Semakin Terjepit. *VOA Indonesia*, 1.
- Gressner, A. M., & Gressner, O. A. (2018). Presepsin. *Lexikon Der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik*, 2, 1–1. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49054-9_2755-1
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–9.
- Lintang, S., Majid, F., & Sholikhah, H. S. (2022). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, 2(2), 92–97.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394>
- Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 854–863. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada Pt X. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 54–58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Trisnayanti, Ida Ayu Ivon; Jati, I. K. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310.
- Ummah, M. S. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).